

**ANALISIS DETERMINAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2017-2020**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

LIA ANJARSARI
B300190163

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS DETERMINAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2017-2020**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

LIA ANJARSARI
B300190163

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhammad Arif', is written over a horizontal line.

Muhammad Arif, S.E., M.Ec. Dev
NIDN.0619128602

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS DETERMINAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2017-2020**

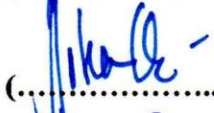
OLEH

**LIA ANJARSARI
B300190163**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 31 Desember 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Muhammad Arif, S.E., M.Ec. Dev
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Ir. Maulidyah Indira Hasmarini, MP
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Sitti Retno Faridatussalam, S.E., M.M
(Anggota II Dewan Penguji)**


(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,

(Prof. Dr. Agus Setyawan, S.E., M.Si)
NIPN. 0616087401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Desember 2022

Penulis

LIA ANJARSARI
B300190163

ANALISIS DETERMINAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2017-2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mengestimasi pengaruh pajak daerah, bantuan sosial, belanja pendidikan, belanja kesehatan, pengeluaran per kapita, dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah Periode 2017-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Uji validitas pengaruh (uji t) menjelaskan bahwa pajak daerah, belanja pendidikan, pengeluaran per kapita, dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, bantuan sosial, dan belanja kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah periode 2017-2020.

Kata kunci: IPM, pajak daerah, bantuan sosial, belanja pendidikan, belanja kesehatan, pengeluaran per kapita, upah minimum

Abstract

This study aims to determine the role of local governments in improving the Human Development Index (HDI), as well as estimating the effect of regional taxes, social assistance, education expenditures, health expenditures, per capita expenditures, and minimum wages on the Human Development Index (HDI) in Central Java for the 2017-2020 period. This research uses a quantitative approach with the panel data regression analysis method. The results showed that the best model chosen was the Fixed Effect Model (FEM). The effect validity test (t-test) explains that local taxes, education expenditures, per capita expenditures, and minimum wages are positive and significant. Meanwhile, social assistance and health spending have a negative and significant effect on the Human Development Index (HDI) in Central Java for the 2017-2020 period.

Keywords: HDI, local taxes, social assistance, education spending, health spending, per capita spending, minimum wage

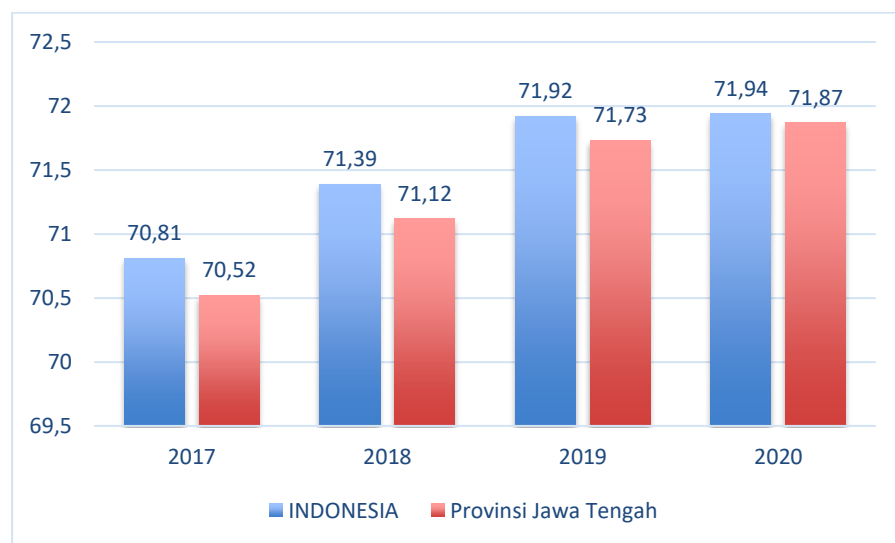
1. PENDAHULUAN

Indonesia kini memasuki masa penting untuk memperkuat kehadirannya di tingkat internasional. Peningkatan kualitas pembangunan manusia merupakan langkah terpenting yang diambil oleh pemerintah untuk memungkinkan Indonesia meningkatkan eksistensinya di tingkat nasional dan internasional (Novitasari & Hapitri, 2019). Pembangunan manusia sebagai proses yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepuasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan dapat dikatakan sebagai kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di tengah Pulau Jawa. Jawa Tengah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah menempati urutan ke-13 di Indonesia setelah Sumatera Utara. Meskipun nilai IPM Jawa Tengah termasuk dalam kategori IPM tinggi pada tahun 2017-2020, namun nilai IPM Jawa Tengah masih lebih rendah dari nilai IPM nasional. Grafik 1 memperlihatkan perbandingan nilai IPM di Jawa Tengah dan Indonesia tahun 2017-2020.

Grafik 1. Perbandingan Indeks pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2017-2020 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik 1 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah mengalami peningkatan secara bertahap dari 70,52 persen menjadi 71,87 persen dari tahun 2017 hingga 2020 atau berada pada tren yang meningkat. Peningkatan nilai IPM menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nilai IPM tersebut masih di bawah rata-rata IPM nasional sebesar 70,81 persen hingga 71,94 persen. IPM Jawa Tengah tumbuh rata-rata 0,6 persen per tahun selama

periode tersebut. Pada tahun 2020, IPM di Provinsi Jawa Tengah tumbuh sebesar 0,14 persen, lebih lambat dari tahun lalu. Penyebab perlambatan pertumbuhan IPM adalah pandemi Covid-19 yang membawa perubahan pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimensi umur panjang dan hidup sehat, dinyatakan sebagai Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur kesehatan, pengetahuan yang dinyatakan sebagai Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur pendidikan dan standar hidup layak dinyatakan sebagai pengeluaran per kapita yang disesuaikan, ditentukan berdasarkan pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Badan Pusat Statistik, 2015).

Oleh karena itu, peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan fiskal yaitu realisasi belanja daerah dibidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial serta penerimaan pajak daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah di tingkat nasional. Selain kebijakan fiskal, faktor lain seperti pengeluaran per kapita, dan upah minimum diduga mempengaruhi kesejahteraan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan mengukur arah besarnya pengaruh pajak daerah, bantuan sosial, belanja pendidikan, belanja kesehatan, pengeluaran per kapita, dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2020.

Menurut pandangan Amartya Sen, sejahtera berarti sehat, makan-makanan bergizi, berpakaian yang pantas, meleak huruf dan panjang umur. Dalam arti yang lebih luas, berarti menjadi baik atau mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, bebas bergerak (*mobile*), dan memiliki kebebasan untuk menjadi orang yang diinginkan (Todaro & Smith, 2009). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materi, intelektual, dan sosial agar warga

negara dapat hidup layak, berkembang, dan memenuhi kewajiban sosialnya (Undang-Undang, 2009).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kesejahteraan manusia, atau kualitas hidup manusia. *Human Development Index* (HDI) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan suatu negara dengan mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan (Todaro & Smith, 2009). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan pengembangan dari *Milenium Development Goals* (MDGs) yang fokus pada pembangunan manusia. Dalam pengembangan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdapat peluang untuk menggabungkan konsep penetapan tujuan nasional seperti tujuan pembangunan ekonomi, tujuan pembangunan kependudukan, dan tujuan pembangunan lingkungan yang akan menggerakkan proses ke depan dan menciptakan keberlanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan masa depan (Widyaningsih & Arif, 2022).

Menurut UNDP pembangunan manusia dipahami sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*) dan sejauh mana upaya tersebut telah dicapai. “Perluasan Pilihan” hanya dapat terwujud jika penduduk paling tidak memiliki: kesempatan hidup panjang umur dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta kesempatan untuk mewujudkan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif. Dengan kata lain, pencapaian ketiga faktor tersebut setidaknya dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah (Badan Pusat Statistik, 2013).

1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1.1.1 Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan pajak daerah adalah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat (Undang-Undang, 2009). Pendapatan daerah dari sektor pajak dapat dijadikan sebagai sumber pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Munawir S., pajak berfungsi sebagai *regulerend* yang berarti pajak bertindak sebagai alat untuk mengatur atau menegakkan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (Sulastyawati, 2020). Dalam penelitian (Prasetyowati & Panjawa, 2022) distribusi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia.

1.1.2 Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja bantuan sosial termasuk dalam belanja operasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwasanya belanja bantuan sosial adalah pengeluaran dalam bentuk bantuan tunai, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang miskin atau tidak mampu, untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian (Zebua & Adib, 2014) menjelaskan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.1.3 Belanja Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Undang-Undang, 2003). Dalam penelitian (Latiffa et al., 2017) teori *human capital* menjelaskan bahwa pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia merupakan investasi modal manusia yang memberikan banyak manfaat seperti kondisi kerja yang lebih baik, produktivitas, peningkatan kesejahteraan, dan pendapatan tambahan jika tingkat

pendidikan yang lebih tinggi dapat dicapai dibandingkan dengan pendapatan lulusan yang berpendidikan lebih rendah. Pendidikan merupakan investasi penting dalam menguasai masa depan dunia secara global. Ada beberapa peneliti yang mengakui bahwa belanja Pendidikan dapat meningkatkan pembangunan manusia seperti pada penelitian (Harjunadhi & Rahmawati, 2020) yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan dan hubungan yang positif antara belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam penelitian (Marlin et al., 2022) menunjukkan belanja fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

1.1.4 Belanja Kesehatan

Belanja fungsi kesehatan adalah belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar atas pelayanan kesehatan berupa pelayanan dan fasilitas kesehatan yang merupakan prasyarat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat (Todaro & Smith, 2012). Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan (Todaro & Smith, 2011). Dalam penelitian (Tamara & Yewati, 2020) teori *public finance* menyatakan bahwa dana alokasi pemerintah pada bidang kesehatan juga berlaku dimana hal tersebut sangat perlu untuk menunjang kesehatan masyarakat diukur dengan angka harapan hidup sebagai salah satu dimensi dasar IPM. Hasil penelitian (Novitasari & Hapitri, 2019) menunjukkan realisasi belanja pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Tamara & Yewati, 2020) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.1.5 Pengeluaran Per kapita

Ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat ditemukan pada perilaku konsumen. Dapat dikatakan bahwa jika pendapatan masyarakat meningkat dan sebagian digunakan untuk konsumsi selain makanan, maka tingkat kesejahteraan juga akan meningkat. Pergeseran pengeluaran konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator untuk mengukur peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Bisa kita asumsikan bahwa setelah kebutuhan makanan terpenuhi, maka kelebihan pendapatan dapat digunakan untuk pengeluaran yang masuk ke konsumsi non-makanan seperti investasi dan tabungan. Daya beli masyarakat untuk mengonsumsi suatu barang berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (Todaro, 2006). Hasil penelitian (Indrayanti, 2020) menyatakan bahwa pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.1.6 Upah Minimum Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa upah minimum didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum Kabupaten/Kota merupakan komponen pendapatan seseorang di daerah tersebut, sehingga tingkat upah merupakan indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara. Kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota dapat meningkatkan standar hidup layak dan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian (Herman, 2018) menyatakan bahwa upah minimum Kabupaten/Kota terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. METODE

2.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data *time series* dalam penelitian ini menggunakan data periode tahun 2017-2020. Data *cross section* meliputi 29 kabupaten, dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang diteliti meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pajak daerah, bantuan sosial, belanja pendidikan, belanja kesehatan, pengeluaran per kapita, dan upah minimum Kabupaten/Kota.

2.2 Alat dan Model Analisis Data

Penelitian kuantitatif ini menggunakan model ekonometrika regresi. Menurut (Gujarati & Porter, 2009) regresi adalah analisis statistik untuk mengukur seberapa besar pengaruh antar variabel dependen dengan variabel independen. Model estimasi dalam penelitian ini dapat dimodelkan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}PD_{it} + \beta_2 BSOS_{it} + \beta_3 \text{Log}BPEND_{it} + \beta_4 \text{Log}BKES_{it} \\ + \beta_5 \text{Log}PKMBM_{it} + \beta_6 \text{Log}UMK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

<i>IPM</i>	=	Indeks Pembangunan Manusia (%).
<i>PD</i>	=	Pajak Daerah (Rp Juta).
<i>BSOS</i>	=	Belanja Bantuan Sosial (Rp Juta).
<i>BPEND</i>	=	Belanja Pendidikan (Rp Juta).
<i>BKES</i>	=	Belanja Kesehatan (Rp Juta).
<i>PKMBM</i>	=	Pengeluaran per Kapita Makanan Non Makanan (Rp Juta).
<i>UMK</i>	=	Upah Minimum Kabupaten (Rp Juta).
ε	=	<i>Error term</i> (faktor kesalahan).
β_0	=	Konstanta.
$\beta_1 \dots \beta_6$	=	Koefisien regresi variabel independen.
<i>i</i>	=	<i>Cross section</i> (29 Kabupaten, 6 Kota di Jawa Tengah).
<i>t</i>	=	<i>Time Series</i> (Periode 2017-2020).

Ada tiga teknik pendekatan dalam menggunakan data panel yaitu *Common Effects Model* (CEM), *Fixed Effects Model* (FEM) dan *Random Effects Model* (REM). Dalam memilih model dari ketiga analisis tersebut maka diperlukan beberapa teknik pengujian, yaitu pengujian likelihood ratio (uji chow), dan hausman test (uji hausman).

Tabel 1. Dimensi Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah

Simbol	Keterangan	Satuan
IPM	Indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan komponen kualitas hidup. IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan, dan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan.	Angka Indeks nya
PD	Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari iuran wajib daerah oleh masyarakat atau lembaga.	Juta Rupiah
BSOS	Pengeluaran pemerintah berupa uang transfer, barang atau jasa.	Juta Rupiah
BPEND	Pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah di bidang Pendidikan. Data yang digunakan realisasi belanja fungsi Pendidikan.	Juta Rupiah
BKES	Pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Data yang digunakan realisasi belanja fungsi kesehatan.	Juta Rupiah
PKMBM	Pengeluaran konsumsi rumah tangga makanan dan non makanan.	Juta Rupiah
UMK	Imbalan yang diterima oleh pegawai/karyawan dalam bentuk uang atau barang selama satu bulan yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan. Gaji bersih yang relevan adalah setelah dikurangi iuran wajib, pajak penghasilan, dll.	Juta Rupiah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat seberapa besar pengaruh pajak daerah, belanja bantuan sosial, belanja pendidikan, belanja kesehatan, pengeluaran per kapita, dan upah minimum Kabupaten/Kota dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di

Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan pemilihan model terbaik. Berikut hasil estimasi model regresi data panel.

Tabel 2. Hasil Analisis Data Panel

Variabel	Koefisien Regresi					
	CEM	Prob	REM	Prob	FEM	Prob
C	112,4075	0,000	110,6307	0,0000	87,8283	0,0000
LOG(PD)	-0,1406	0,5898	-0,0224	0,9514	1,5093	0,0124
BSOS	-0,0079	0,1666	-0,0052	0,0005	-0,0047	0,0018
LOG(BPEND)	0,6016	0,4128	0,7746	0,0451	1,0172	0,0131
LOG(BKES)	-3,6141	0,0009	-4,0886	0,0000	-3,9408	0,0000
LOG(PKMBM)	16,9396	0,0000	3,8132	0,0000	1,5207	0,0998
LOG(UMK)	1,1755	0,5890	7,0493	0,0000	7,3173	0,0000
R-squared	0,6782		0,5940		0,9895	
F-statistic	46,7171		32,4263		232,4778	
Prob (F-statistic)	0,0000		0,0000		0,0000	

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 3. Pemilihan Model Terbaik

Redundant Fixed Effects Tests (Chow test)			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	86,038094	(34,99)	0,0000
Cross-section Chi-square	478,70389	34	0,0000
Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	58,390446	6	0,0000

Sumber: Data sekunder yang diolah

Uji Chow merupakan uji yang dilakukan untuk membandingkan pemilihan model terbaik diantara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Hipotesis Uji Chow sebagai berikut, H_0 : Model terpilih *Common Effect Model* (CEM); H_A : model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan tabel 3, probabilitas *cross section F* sebesar 0,0000 ($< 0,01$), maka H_0 ditolak, dan model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* (REM) lebih baik digunakan dari *Fixed Effect Model* (FEM). Hipotesis uji Hausman sebagai berikut H_0 : model terpilih *Random Effect Model* (REM); H_A : model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan tabel 3, probabilitas *chi-sq; cross section* sebesar 0,0000 ($< 0,01$), maka H_0 ditolak model yang terpilih adalah *fixed effect* model (FEM).

Fixed Effect Model (FEM) menjadi model terpilih yang akan digunakan dalam mengestimasi pengaruh pajak daerah, bantuan sosial, belanja pendidikan, belanja kesehatan, pengeluaran per kapita, dan upah minimum dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa tengah Periode 2017-2020. Berikut hasil analisis regresi model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Fixed Effect Model (FEM)

$IPM_{it} = 87,8283 + 1,5093 \text{ LogPD}_{it} - 0,0047 \text{ BSOS}_{it} + 1,0172 \text{ LogBPEND}_{it}$		
(0,0124)**	(0,0018)*	(0,0131)**
$-3,9408 \text{ LogBKES}_{it} + 1,5207 \text{ LogPKMBM}_{it} + 7,3173 \text{ LogUMK}_{it}$		
(0,000)*	(0,0998)***	(0,0000)*
$R^2 = 0,9895; \text{Adj. } R^2 = 0,9852; F - \text{Stat} = 232,4778; \text{Prob. } F - \text{Stat} = 0,0000$		

Sumber: Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 1\%$; **Signifikan pada $\alpha = 5\%$; ***Signifikan pada $\alpha = 10\%$. Angka dalam kurung adalah probabilitas empirik (p value) t-statistik.

3.1 Koefisien Determinasi

Pada tabel 4 terlihat nilai $R^2 = 0,9895$, artinya 98,95 persen variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model statistik yaitu pajak daerah, bantuan sosial, belanja pendidikan, belanja kesehatan, pengeluaran per kapita makanan non makanan, dan upah minimum Kabupaten/Kota, sisanya 1,05% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

3.2 Uji Eksistensi Model (Uji F)

Uji *F* digunakan untuk menguji eksistensi suatu model. Pada tabel 4 terlihat nilai probabilitas *F-stat* = 0,0000 ($< 0,01$), H_0 ditolak, maka model yang dipakai eksis. Variabel pajak daerah, bantuan sosial, belanja pendidikan, belanja kesehatan,

pengeluaran per kapita dan upah minimum yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah periode 2017-2020.

3.3 Uji Validitas Pengaruh

Hasil uji validitas pengaruh dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Pengaruh

Simbol	Sig.t	Kesimpulan
LOG(PD)	0,0124	Signifikan pada $\alpha = (< 0,05)$
BSOS	0,0018	Signifikan pada $\alpha = (< 0,01)$
LOG(BPEND)	0,0131	Signifikan pada $\alpha = (< 0,05)$
LOG(BKES)	0,0000	Signifikan pada $\alpha = (< 0,01)$
LOG(PKMBM)	0,0998	Signifikan pada $\alpha = (< 0,10)$
LOG(UMK)	0,0000	Signifikan pada $\alpha = (< 0,01)$

Sumber: Data sekunder yang diolah

3.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2020 dengan koefisien regresi sebesar 1,5093 dan probabilitas sebesar 0,0124 ($< 0,05$). Pola hubungan antara pajak daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah linier-logaritma (lin-log), sehingga jika pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan naik sebesar $1,5093/100 = 0,015093$ angka indeksinya. Sebaliknya, jika pajak daerah mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami penurunan sebesar 0,015093 angka indeksinya. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian (Saragih, 2018) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia (IPM), yang berarti pemerintah sudah efektif dalam menerapkan kebijakan perpajakan sebagai kontribusi dari penerimaan pajak yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat melalui pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pelayanan

publik yang mencakup layanan kesehatan, pendidikan, dll. Hal ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menciptakan kesejahteraan, dan menjamin semakin baiknya indeks pembangunan manusia.

3.3.2 Pengaruh Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa variabel bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2020 dengan koefisien regresi sebesar -0.0047 dan probabilitas 0,0018 ($< 0,01$). Pola hubungan antara bantuan sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) linier-linier (lin-lin). Sehingga, jika bantuan sosial naik 1 juta rupiah, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan turun sebesar 0,0047 angka indeksnya. Sebaliknya, jika bantuan sosial turun sebesar 1 juta rupiah, maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar 0,0047 angka indeksnya. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian (Hidarini et al., 2018) yang menunjukkan bahwa belanja perlindungan sosial yang terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena semakin besar anggaran belanja sosial di suatu kabupaten/kota di Indonesia, semakin sedikit ruang fiskal yang tersedia untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh program perlindungan sosial yang belum menjadi bidang prioritas pemerintah pusat sehingga penerimaan pajak masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan belanja kegiatan lain, misalnya pendidikan. Faktor penyebab lainnya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat belum digunakan dengan baik oleh masyarakat.

3.3.3 Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel belanja Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2020 dengan koefisien regresi sebesar 1,0172 dan probabilitas 0,0131 ($< 0,05$). Pola hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah linier-logaritma (lin-log). Jadi, jika belanja pendidikan naik sebesar 1 persen maka indeks pembangunan manusia akan naik sebesar $1,0172/100 = 0,010172$ angka

indeksnya. Sebaliknya, jika belanja pendidikan mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka indeks pembangunan manusia akan turun sebesar 0,010172 angka indeks. Hal ini sesuai dengan penelitian (Marlin et al., 2022) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah fungsi Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berarti komitmen untuk menyediakan anggaran disektor pendidikan 20% berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 harus terus dilaksanakan, karena pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dimaknai secara positif dalam investasi pembangunan sumber daya manusia.

3.3.4 Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Belanja kesehatan memiliki koefisien regresi sebesar -3,9408 dengan nilai probabilitas 0,0000 dan signifikan pada alfa 0,01. Belanja kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pola hubungan linier-logaritma (lin-log), sehingga jika belanja kesehatan meningkat 1 persen maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan turun sebesar $-3,9408/100 = 0,039408$ angka indeks. Sebaliknya jika belanja kesehatan turun sebesar 1 persen maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami kenaikan sebesar 0,039408 angka indeks. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fahmi, 2018) yang mengatakan belanja fungsi kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal tersebut terjadi karena peningkatan belanja kesehatan tidak dibarengi dengan peningkatan efisiensi belanja, dan alokasi fungsi belanja kesehatan yang belum tepat sasaran, serta sebagian besar anggaran belanja kesehatan masih bertumpu pada belanja kuratif (penyembuhan) dari pada preventif (pencegahan).

3.3.5 Pengaruh Pengeluaran per Kapita Makanan Non Makanan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah Periode 2017-2020 dengan koefisien regresi sebesar 1,5297 dan probabilitas 0,0998 ($< 0,10$). Pola hubungan antara pengeluaran per kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah linier-logaritma (lin-log), sehingga

jika pengeluaran per kapita naik sebesar 1 persen, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami kenaikan sebesar $1,5297/100 = 0,015297$ angka indeksinya. Sebaliknya, jika pengeluaran per kapita turun sebesar 1 persen, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan turun sebesar $0,015297$ angka indeksinya. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian (Indrayanti, 2020) yang menyatakan pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk makan dan kebutuhan lainnya menunjukkan peningkatan pendapatan rumah tangga atau masyarakat. Masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya mencerminkan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

3.3.6 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan manusia (IPM) di Jawa Tengah periode 2017-2020 dengan koefisien regresi sebesar 7,3173 dan probabilitas 0,0000 ($<0,01$). Pola hubungan antara upah minimum kabupaten/kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu linier logaritma (lin-log), sehingga jika upah minimum Kabupaten/Kota naik sebesar 1 persen, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami kenaikan sebesar $7,3173/100 = 0,073173$ angka indeksinya. Sebaliknya, jika upah minimum Kabupaten/Kota turun sebesar 1 persen, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan turun sebesar $0,073173$ angka indeksinya. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian (Harjunadhi & Rahmawati, 2020) dan (Nurul et al., 2022) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berarti kenaikan upah minimum berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 15 Tahun 2018, upah minimum ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum yang ditetapkan mampu meningkatkan daya beli (*purchasing power*) penduduk Indonesia menurut standar Kebutuhan

Hidup Layak (KHL) yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, yang merupakan bagian dari dimensi pembangunan manusia.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman, model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) yang menunjukkan hasil uji validitas pengaruh pajak daerah, belanja Pendidikan, pengeluaran per kapita makanan non makanan, dan upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dapat dilihat bahwa kebijakan perpajakan dan penetapan upah yang diterapkan pemerintah sudah efektif dengan melakukan pembangunan daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta dengan adanya penetapan upah, semakin tinggi pendapatan maka menunjukkan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Sedangkan, bantuan sosial, dan belanja kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut terjadi karena alokasi anggaran untuk bantuan sosial dan belanja kesehatan belum dialokasikan secara merata dan tepat sasaran. Untuk uji eksistensi model atau uji *F* menunjukkan bahwa model yang dipakai eksis. $R^2 = 0,9895$, artinya 98,95 persen variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model statistik yaitu pajak daerah, bantuan sosial, belanja pendidikan, belanja kesehatan, pengeluaran per kapita makanan non makanan, dan upah minimum Kabupaten/Kota. sisanya 1,05% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

4.2 Saran

Untuk mencapai angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat nasional diharapkan pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang efektif, dan mewujudkan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, serta perlu mengevaluasi dan memantau program-program yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, diharapkan alokasi anggaran daerah dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

PERSANTUNAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberi semangat, dan doa yang terbaik. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada pembimbing penulis yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan yang baik dalam penyelesaian penelitian ini, serta semua pihak yang terlibat dalam penelitian yang telah memberikan dukungan, atau membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2013). *Indeks Pembangunan Manusia 2013*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- Claudia, K. S., & Arif, M. (2022). Determinant Analysis of Human Development Index (HDI) in Semarang Residency. *Atlantis Press*, 655(Icoeb), 52–58.
- Fahmi, A. (2018). Pengaruh Good Governance, Belanja Fungsi Pendidikan dan Kesehatan, dan Pdrb Perkapita Terhadap IPM. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 2(1), 23–34.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. In *Introductory Econometrics: A Practical Approach* (5th ed.).
- Harjunadhi, J. T., & Rahmawati, F. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan UMP terhadap IPM di Indonesia Tahun 2014–2018. *Inovasi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 241–249.
- Herman. (2018). Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru (2009-2016). *Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 20–24.
- Hidarini, R. A., Dwi, A., & Bawono, B. (2018). Peran Belanja Pendidikan dan Belanja Perlindungan Sosial sebagai Variabel Moderating terhadap Hubungan Ruang Fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Empiris di Seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun 2018). *Seminar Nasional Dan*

Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4.0, 285–296.

- Indrayanti, W. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 353–363.
- Kusuma, A. P., & Arif, M. (2022). An Analysis of the Effectiveness of Local Government Expenditure Allocations in Education, Health, Social Assistance, and Per Capita Income on The Human Development Index in The Pati Residency. *Atlantis Press*, 655(Icoebs), 162–169.
- Latiffa, N., Rotinsulu, D., & Tumilaar, R. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 106–117.
- Marlin, S., Mus, A. R., & Junaid, A. (2022). Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomika*, 6(2), 210–224.
- Novitasari, Y., & Hapitri, D. (2019). Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan, serta Pengaruhnya terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala-Repository IMWI*, 2(1), 1–15.
- Nurul, A., Kusuma, D., & Faridatussalam, S. R. (2022). Analysis of Variables Affecting the Human Development Index of the Special Region of Yogyakarta Regency/City 2015-2020. *Annual International Conference on Islamic Economics and Bussiness*, 2(1), 353–361.
- Prasetyowati, H., & Panjawa, J. L. (2022). *Teknologi dan distribusi pajak mendukung kualitas pembangunan manusia*. 2(2), 23–36.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (pp. 1–124). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Saragih, A. H. (2018). An Analysis of Local Taxes Revenue's Effect on Human Development Index. *Jurnal Economia*, 14(2), 197–211.
- Sulastyawati, D. (2020). Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 7(10), 119–128.

- Tamara, Y., & Yeniwati. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial dan Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(3), 57–62.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid Satu*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi (Kesebelas)*. Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Developement* (11th ed.). Addison-Wesley.
- Undang-Undang. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Widyaningsih, A. H., & Arif, M. (2022). Panel Data Analysis of Government Policy on Human Development Index in Central Java Province. *Atlantis Press*, 655(Icoebs), 396–403.
- Zebua, F. W., & Adib, Z. (2014). Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1), 1–18.